

**UPAYA PERCEPATAN PENYELESAIAN  
PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG  
BERBASIS KERJA BERSINERGI DI KABUPATEN GRESIK**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**JEFRI DETHAN**

**NIT. 19283305**

**Diploma IV Pertanahan**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRACT

*The Land Thematic Map is a map that presents georeferenced themes needed for land analysis and to present land spatial information (Arnowo, 2021). The Land and Space Thematic Map (PTPR) is a product of the Directorate of Thematic Survey and Mapping of the Ministry of ATR / BPN and has a strategic position as a basic layer in planning activities, development of land and space activities (Directorate of Thematic Survey and Mapping, 2020).*

*This research uses a qualitative research method with a descriptive approach which is carried out to find out more about the stages of implementation as a research instrument, so that researchers have the assumption that this qualitative method can be used to observe the acceleration of the completion of the Thematic Land and Space Map based on synergized work in Gresik Regency in order to realize a complete district which can then be used as evaluation material for the Gresik Regency Land Office. Researchers selected informants for this study, namely (1) Head of the Gresik District Land Office, (2) Head of the Survey and Mapping Section of the Gresik District Land Office, (3) Head of Kelurahan / Village Head, (4) Implementers of Thematic Land and Space Map Activities, and (5) Regional Secretary of Gresik Regency.*

*Data collection techniques were carried out by interviews and study of documents related to documents that can provide information related to the process and results of the implementation of PTPR. The results of this study are (1) The results of the efforts made to accelerate the completion of the thematic maps of land and work-based spaces in synergy in Gresik Regency, namely as following: (a) There is synergy between parties in this case the Land Office, Regional Government and Village Government through the Trijulang Pattern so that the desired success is achieved. This is shown by the completion of PTPR in 4 (four) Districts, namely Gresik District, Kebomas District, Kedamean District and Wringinanom District, having exceeded the target set for land parcels, namely 174,500 plots resulting from the initial target of 153,500 plots. (b) There is a new strategy used, namely the Movement to Place Boundary and Spatial Signs (GEBETAN BARU). This movement carried out the installation of boundary signs simultaneously with landowners and boundary neighbors in the framework of securing assets. (c) There is an effort to improve data by integrating PTPR Gresik Regency with Registration Map data on the KKP application. (d) Another effort is cooperation with the Regional Government in providing additional socialization through the government regarding appeals to landowners to play an active role in the implementation of PTPR and (2) The supporting factor for accelerating the completion of PTPR is the existence of support and good cooperation from the Parties between the Office Other land affairs, Regional Government and Village Government.*

*Keywords: Synergies, The Thematic Mapping, Efforts.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>INTISARI</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Batasan Penelitian .....	4
E. Keaslian Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Kerangka Teoritis .....	8
1. Pendaftaran Tanah .....	8
2. Peta Tematik Pertanahan dan Ruang .....	9
3. Kualitas Produk PTPR .....	11
4. Sinergi Antar Pihak .....	12
B. Kerangka Pemikiran .....	17
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	19
A. Format Penelitian .....	19
B. Lokasi Penelitian .....	19
C. Informan dan Teknik Penentuan Informan .....	20
D. Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data .....	20

E. Teknik Analisis Data .....	23
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Kondisi Geografis, Batas Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Gresik.....	24
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik .....	27
<b>BAB V PELAKSANAAN SINERGI ANTAR PIHAK DALAM UPAYA         PERCEPATAN PTPR DI KABUPATEN GRESIK .....</b>	<b>32</b>
A. Pelaksanaan Sinergi Antar Pihak Dalam Percepatan PTPR di Kabupaten Gresik.....	32
1. Pola Sinergi Yang Dibangun Di Kabupaten Gresik .....	32
2. Implementasi Sinergi Para Pihak Pada Kegiatan PTPR .....	34
B. Capaian Pelaksanaan PTPR Melalui Kerja Bersinergi .....	45
1. Kuantitas Bidang Tanah Terpetakan.....	45
2. Kualitas Bidang Tanah Terpetakan.....	52
<b>BAB VI FAKTOR PENDUKUNG DAN KENDALA DALAM         PELAKSANAAN PTPR .....</b>	<b>56</b>
A. Faktor Pendukung Pencapaian Penyelesaian Target Pemetaan Dalam Pelaksanaan PTPR .....	56
1. Faktor Pendukung Internal.....	58
2. Faktor Pendukung Eksternal.....	59
B. Kendala Dalam Penyelesaian Target PTPR.....	60
1. Kendala Internal.....	60
2. Kendala Eksternal .....	60
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yaitu menciptakan tatanan hidup yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik, kasus pertanahan diseluruh pelosok tanah air, penataan perangkat hukum, sistem pengelolaan lahan agar tidak menimbulkan sengketa, dan kasus konflik dikemudian hari (Chaebur, 2019). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik melaksanakan Survei Pemetaan Tematik Lahan dan Spasial berbasis persil, dengan melakukan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang berguna untuk perangkat Tata Ruang, Reforma Agraria, dan Mitigasi Permasalahan Agraria yang diwujudkan dalam bentuk Peta Tematik Pertanahan (Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik, 2020).

Peta Tematik Pertanahan adalah peta yang menyajikan tema berbasis georeferensi yang dibutuhkan untuk analisis pertanahan dan untuk menyajikan informasi spasial pertanahan (Arnowo, 2021). Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) merupakan produk dari Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR/BPN memiliki posisi strategis sebagai lapisan dasar/*basic layer* dalam kegiatan perencanaan, pengembangan kegiatan pertanahan dan ruang (Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik, 2020). PTPR memiliki beragam manfaat untuk sejumlah *Stakeholder*, diantaranya: (1) Bagi Pemerintah Daerah, PTPR digunakan untuk basis data perencanaan pembangunan wilayah dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); (2) Bagi Kementerian ATR/BPN, sebagai dasar pelaksanaan Kebijakan Nasional, Regional, Sektoral di bidang pertanahan. Contohnya Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, Legalisasi Aset, Pengendalian Pertanahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Konsolidasi Tanah, Penatagunaan Tanah, Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; dan (3) Bagi Pemerintah Desa,

untuk membantu penentuan batas desa yang belum definitif, inventarisasi potensi desa, penentuan batas antara kawasan hutan dan area penggunaan lain yang bisa dikuasai masyarakat, serta mempercepat proses identifikasi subjek dan objek pajak. Sedemikian banyak manfaat dari PTPR maka PTPR menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan guna peningkatan data Pemetaan bidang oleh Kantor Pertanahan.

Salah satu Kantor Pertanahan yang menjalankan PTPR yaitu kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Pelaksanaan PTPR di Kabupaten Gresik sendiri tidak terlepas dari surat permohonan Bupati Gresik Nomor : 900/576/437.32/2022 tentang Permohonan Kegiatan Pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) yaitu Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Sektoral di Kabupaten Gresik. Permohonan tersebut dibuat oleh Bupati Gresik menyikapi masih rendahnya jumlah bidang tanah terpetakan. Hal tersebut juga disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik bahwa masih terdapat 176 ribu bidang tanah yang belum diukur dan 151 ribu bidang tanah yang belum bersertipikat yang tersebar di 18 kecamatan dan 356 desa/kelurahan (Diskominfo Kabupaten Gresik, 2022). Berdasarkan road map dan permohonan Bupati tersebut dilaksanakanlah PTPR di Gresik pada tahun anggaran 2022, hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan Dan Ruang Nomor 169/SK-300.ST/VII/2022 Tentang Penyelenggaraan Pembuatan Peta Tematik Pertanahan Dan Ruang (PTPR) Dalam Rangka Mendukung Perencanaan Pembangunan Sektoral Pemerintah di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2022.

Target jumlah bidang tanah yang harus diselesaikan melalui PTPR berdasarkan SK Dirjend SPPR tersebut sebanyak  $\pm$  153.000 bidang pada 4 Kecamatan dan 72 Desa, dalam pelaksanaannya PTPR tersebut dilaksanakan melalui Sinergi Antar Pihak yang melibatkan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, jajaran pemerintah kelurahan/desa, serta partisipasi masyarakat Kabupaten Gresik. Strategi sinergi tersebut dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah proses pemetaan bidang tanah, yang hasilnya berupa peta yang bermanfaat bagi banyak pihak dan berkualitas.

Salah satu dampak positif dari sinergitas tersebut yaitu ketercapaian pemetaan bidang tanah melalui PTPR di akhir tahun 2022 yang melebihi target. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik bahwa terdapat 180.000 bidang tanah telah terpetakan dari target 153.000 melalui PTPR tahun anggaran 2022 (Heri A, 2022). Namun, disaat percepatan penyelesaian dilakukan masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil pengolahan PTPR dan peta pendaftaran di Kegiatan Komputerisasi Pertanahan (KKP). Letak ketidaksesuaian terletak didata PTPR dengan peta pendaftaran bentuk ketidaksesuaian tersebut berupa ketidaksesuaian subjek dan objek serta terdapat bidang gap/overlap antara hasil pengolahan PTPR dan peta pendaftaran. Tidak adanya gap/overlap antara peta produk PTPR dan peta pendaftaran merupakan komitmen bersama antara para pihak di Gresik karena produk PTPR akan digunakan sebagai dasar penerbitan sertipikat pada kegiatan PTSL tahun berikutnya. Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “UPAYA PERCEPATAN PENYELESAIAN PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG BERBASIS KERJA BERSINERGI DI KABUPATEN GRESIK”.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan dilatar belakang, masalah inti dari penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara produk PTPR dengan data bidang tanah di KKP yang sebelumnya dihasilkan melalui rangkaian kerja bersinergi. Adapun pertanyaan penelitian antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan sinergi antar pihak dalam upaya percepatan PTPR di Kabupaten Gresik ?
2. Faktor pendukung dan kendala apa saja yang berpengaruh pada pencapaian penyelesaian target dan kualitas peta yang dihasilkan ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui pelaksanaan sinergi antar pihak dalam upaya percepatan PTPR di Kabupaten Gresik.
- b) Mengetahui faktor atau kendala yang berpengaruh pada capaian penyelesaian target dan kualitas peta yang dihasilkan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil kegiatan penelitian ini antara lain :

##### a) Kegunaan Peneliti

Kegunaan hasil penelitian bagi peneliti yaitu diharapkan akan membantu menambah wawasan tentang kerja bersinergi dalam penyelesaian pembuatan peta tematik pertanahan dan ruang dalam upaya percepatan penyelesaian dan kualitas PTPR.

##### b) Kegunaan Lembaga

Kegunaan penelitian ini bagi lembaga Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional adalah sebagai bahan pengetahuan mengenai sinergi antar pihak dalam kegiatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang.

##### c) Kegunaan Kementerian ATR/BPN

Kegunaan dari penelitian ini bagi Kementerian ATR/BPN adalah sebagai bahan masukan untuk menyusun kebijakan peningkatan kerja bersinergi antar pihak dalam kegiatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang.

### **D. Batasan Penelitian**

Penelitian ini tidak dibahas secara luas permasalahan penyelesaiannya agar menjaga fokus pembahasan, batasan tersebut meliputi:

1. Dalam penelitian ini dibatasi dengan pelaksanaan sinergi antar pihak hanya 3 (tiga) pihak yang dibahas yakni Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
2. Faktor pendukung dan kendala hanya yang berkaitan erat dengan percepatan penyelesaian PTPR yang melibatkan pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik.



## E. Keaslian Penelitian

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilaksanakan terlebih dahulu dari aspek judul penelitian dan hasil penelitiannya terdapat beberapa penelitian dengan fokus yang hampir sama yang dapat dijadikan sebagai acuan awal dalam melakukan penelitian ini. Tabel 1 menunjukkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan dan perbedaan substansinya dengan yang akan diteliti oleh peneliti.

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Sebelumnya Dengan Penelitian Sekarang

PENELITIAN SEBELUMNYA			
No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Frensischa Merry Deviantari (2018)	Sinergi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta	Sinergi para pihak dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Nusukan terwujud melalui dukungan fungsi, pertimbangan motif, dan pemberian manfaat dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta, dan Pemerintah Kelurahan Nusukan serta partisipasi dari masyarakat Kelurahan Nusukan
2	I Wayan Kastika (2019)	Strategi dan Progres Pembangunan “Kota Lengkap” di Kantor Pertanahan Kota Denpasar	Pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilaksanakan di Kota Denpasar yang belum menghasilkan data valid keseluruhan, baik fisik maupun yuridisnya. Terdapat permasalahan yang kualitas informasi pertanahan dengan

			pembenahan data pertanahan melalui pelaksanaan kegiatan “Kota Lengkap”. Strategi pembangunan “Kota Lengkap” yaitu meliputi aspek eksternal dengan kerjasama dengan pemerintah Kota Denpasar dalam hal
3	Aditya Bayu Handono (2020)	Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (Studi di Desa Paseban Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar)	Hasil penelitian menunjukkan adanya strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan kualitas data yaitu: a) penataan sarana dan prasarana; b) pembagian pekerjaan dengan pihak lain; c) melibatkan pemerintah daerah dalam pendanaan; dan d) melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis
4	Putu Eka Yuditha Syahputra (2021)	“Membangun Desa Lengkap Melalui Sinergitas “TRISULA” Di Kabupaten Blora (Studi Di Desa Kembang, Kecamatan Banjarejo).”	Hasil penelitian fokus mengenai peran serta instansi-instansi yang terkait dalam menyukseskan Sinergitas TRISULA dalam membangun Desa Lengkap di Desa Kembang.

PENELITIAN SEKARANG		
Jefri Dethan (2023)	Upaya Percepatan Penyelesaian Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Berbasis Kerja Bersinergi di Kabupaten Gresik	Penelitian sebelumnya meneliti sinergi para pihak dan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sedangkan akan diteliti ini dilakukan pada kegiatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang berbasis Kerja Bersinergi dalam Percepatan Penyelesaian PTPR di Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi/masukan untuk menyukseskan kegiatan PTPR kedepannya.

Sumber: Olah Data Peneliti, 2023

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai upaya percepatan penyelesaian peta tematik pertanahan dan ruang berbasis kerja bersinergi di Kabupaten Gresik, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan untuk percepatan penyelesaian peta tematik pertanahan dan ruang berbasis kerja bersinergi di Kabupaten Gresik yaitu sebagai berikut:
  - a) Adanya sinergi antar pihak dalam hal ini Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melalui Pola Trijuang sehingga mencapai suatu keberhasilan yang diinginkan. Hal ini ditunjukkan dengan penyelesaian PTPR pada 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Wringinanom telah melampaui target bidang tanah yang ditetapkan yakni sebanyak 174.500 bidang yang dihasilkan dari target awal sebanyak 153.500 bidang. Pelaksanaan Sinergi antar pihak ini memanfaatkan peran masing-masing pemangku kepentingan tidak hanya sekedar mencapai target yang diinginkan melainkan merupakan salah satu langkah yang sangat strategis dalam mewujudkan pembaharuan data pertanahan, mewujudkan Gresik Kabupaten Lengkap serta perencanaan pembangunan sektoral di Kabupaten Gresik.
  - b) Adanya strategi baru yang digunakan yaitu Gerakan Pemasangan Tanda Batas dan Ruang (GEBETAN BARU). Gerakan ini melakukan pemasangan tanda batas secara serentak bersama pemilik tanah dan tetangga batas dalam rangka pengamanan aset.
  - c) Adanya upaya perbaikan data dengan mengintegrasikan PTPR Kabupaten Gresik dengan data Peta Pendaftaran pada aplikasi KKP.
  - d) Upaya lainnya adalah kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi tambahan melalui radio pemerintah terkait himbauan kepada pemilik tanah agar berperan aktif dalam pelaksanaan

PTPR.

2. Faktor pendukung dalam rangka percepatan penyelesaian peta tematik pertanahan dan ruang berbasis kerja bersinergi di Kabupaten Gresik diantara yaitu adanya dukungan dan kerjasama parapihak yang diwujudkan dalam:
  - a) Pembagian peran dan tugas yang telah disepakati untuk memperlancar pelaksanaan PTPR melalui pola trijwang, antara lain penyiapan data pendukung yang dibutuhkan, alokasi anggaran, penyiapan data pertanahan sebagai data utama, dan pendampingan secara langsung ketika survei lapang;
  - b) Adanya dukungan lebih diluar pembagian peran dan tugas, hal ini ditunjukkan dengan dukungan sarana prasarana dari pemerintah daerah kepada kantor pertanahan melalui mekanisme pinjam pakai;
  - c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bersama para pihak secara berkala; dan
  - d) Pelaksanaan penanaman tanda batas bersama dalam inovasi kegiatan bernama Gerakan Bersama Pemasangan Tanda Batas dan Ruang (GEBETAN BARU).

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam percepatan penyelesaian PTPR adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat masyarakat yang tidak hadir di lapangan saat penunjukan batas bidang tanah diakibatkan dari kurangnya informasi mengenai sosialisasi PTPR sehingga menghambat pelaksanaan pemetaan dan juga penunjukan batas bidang.
- b) Data hasil survei PTPR ditemukan adanya bidang tanah hasil PTPR yang *overlap* dan tegeser dengan bidang tanah yang ada pada peta pendaftaran di KKP.
- c) Nama pemilik pada data KKP dan hasil PTPR berbeda, karena nama pemilik di KKP tertukar dengan bidang disebelahnya.
- d) Terdapat bidang tanah terdaftar yang belum *update* dan *upload* pada KKP.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa saran untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik agar pelaksanaan percepatan penyelesaian kegiatan pertanahan kedepannya dapat lebih baik lagi dalam menciptakan data pertanahan berkualitas pada setiap desa/kelurahan di Kabupaten Gresik. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Didapatnya hasil integrasi data dari hasil PTPR dan Peta Pendaftaran di Kabupaten Gresik kedepannya dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan ditindak lanjuti sebagai basis data dalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Pertanahan maupun untuk pengembangan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Gresik.
2. Sinergi antar pihak pada tahun anggaran berikutnya dapat direncanakan secara lebih rinci dan teliti lagi sehingga dapat difungsi peran masing-masing pihak dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pertanahan.
3. Data hasil PTPR kiranya dapat dimanfaatkan dalam kegiatan Pertimbangan Teknis agar mampu memudahkan pelayanan terhadap masyarakat.
4. Tujuan awal dari kerja bersinergi antar pihak yaitu terciptanya Data Pertanahan baik di seluruh desa atau kelurahan di Kabupaten Gresik. Oleh sebab itu harus dipastikan bahwa seluruh bidang tanah baik itu data tekstual dan spasialnya benar-benar sudah valid.
5. Untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang diharapkan pelaksanaan pengambilan data PTPR kedepannya dapat dilaksanakan melalui pengukuran kadastral sehingga mendapatkan data dengan ketelitian yang baik dan valid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnowo, H. (2021). *Integrasi Peta Tematik Pertanahan Berbasis Kebijakan Satu Peta (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat)*. PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Buchari, A. (2021). *Optimalisasi Pemanfaatan Peta Tematik Pertanahan Dan Ruang Melalui Integrasi Dengan Geokp “Pilot Project Peta Tematik Pertanahan Dan Ruang Geopark/Geosite Belitong”*. Laporan Aksi Perubahan. Direktorat Survei Dan Pemetaan Tematik.
- Chaebur, H. (2019) *Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agrarian/pertanahan dan tata ruang*. Available at: <https://www.tribunnewswiki.com/2019/10/27/kementerian-agraria-dan-tata-ruang-republik-indonesia> (Accessed: 10 April 2023).
- Collins (2023) *English Dictionary*. Available at: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/synergy> (Accessed: 10 April 2023).
- Deviantari, F.M. (2018). *Sinergi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik (2020) *Petunjuk Teknis Peta Tematik Pertanahan Dan Ruang 2020*. Jakarta.
- Diskominfo Kabupaten Gresik (2022) *Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Buka Rapat Koordinasi Pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang*. Available at: <https://gresikkab.go.id/berita/591-bupati-gresik-fandi-akhmad-yani-buka-rapat-koordinasi-pembuatan-peta-tematik-pertanahan-dan-ruang> (Accessed: 11 April 2023).
- Handono, A.B. (2020). *Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (Studi di Desa Paseban Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan.
- Heri, A. (2022). *Komitmen Bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik “Dalam Mewujudkan Gresik Kabupaten Lengkap Menuju Layanan Pertanahan Berkualitas”*. Paparan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
- Kastika, I.W. (2019). *Strategi dan Progres Pembangunan “Kota Lengkap” di Kantor Pertanahan Kota Denpasar*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Palupi, A. (2022). *Sinergi Pemerintah Kota Dan Bank Indonesia Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Jambi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Rahmawati, T., Noor, I., & Wanusmawatie, I. (2014). *‘Sinergitas stakeholders dalam inovasi daerah (studi pada program seminggu di Kota Probolinggo)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ratmono. (2017). *‘Pelibatan Masyarakat Dan Stakeholder Terkait Dalam Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap’*, dalam Wahyono & Sapardiyono (eds.), *Prosiding Seminar Nasional Pertanahan “Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia: Tantangan Pelaksanaan PTSL Dan Solusinya”*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Santoso, H. (2017). *‘Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia : Tantangan Pelaksanaan PTSL Dan Respon Solusinya’*, dalam Wahyono & Sapardiyono (eds.), *Prosiding Seminar Nasional Pertanahan “Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia: Tantangan Pelaksanaan PTSL Dan Solusinya”*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulasmis, S. (2006). *Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi Dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi*. Jurnal. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya.
- Syahputra, P.E.Y. (2021). *‘Membangun Desa Lengkap Melalui Sinergitas*



*“TRISULA” Di Kabupaten Blora (Studi Di Desa Kembang, Kecamatan Banjarejo)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.  
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota